

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

TAHUN 2025



SUMATERA SELATAN UNGGUL DAN TERDEPAN TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas perkenan Nya Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 dapat disusun dan diselesaikan tepat waktu.

Rencana Kerja ini memuat program, kegiatan dan lokasi disertai dengan indikator kinerja dan pendanaan yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategia (Renstra) 2024 - 2026 Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta hasil evaluasi renja tahun lalu (2023) dan evaluasi renja tahun berjalan (2024).

Rencana Kerja ini disusun dengan memperhatikan asumsi-asumsi dasar yang menggambarkan peran serta potensi sub sektor perkebunan yang diimplementasikan dalam program yang jelas, terukur dan berlanjut serta diplot dalam sub program kegiatan yang berbasiskan satuan kinerja.

Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi pada penyusunan Renja ini, semoga Allah SWT membalas kerja keras kita semua dalam usaha memajukan sektor perkebunan di Sumatera Selatan.

Demikian, semoga Rencana Kerja ini dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan Pembangunan Perkebunan di Sumatera Selatan Tahun 2025. kritik dan saran masih kami harapkan guna penyempurnaan Rencana Kerja Pembangunan Perkebunan kedepan.

Palembang, Desember 2024

Kepala Dinas Perkebunan
Provinsi Sumatera Selatan



Ir. AGUS DARWA, M.Si.
Pembina Utama Madya IV/d
NIP. 19650824 199403 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
I. PENDAHULUAN	1 BAB I
A. Latar Belakang	1 BAB I
B. Landasan Hukum	2 BAB I
C. Maksud dan Tujuan	4 BAB I
D. Sistematika Penulisan	5 BAB I
II. GAMBARAN UMUM DINAS PERKEBUNAN	1 BAB II
III. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA	
ANGGARAN SKPD	1 BAB III
A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023.....	1 BAB III
B. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Berjalan (2024)	4 BAB III
C. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	8 BAB III
D. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	8 BAB III
E. Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	8 BAB III
IV. TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	1 BAB IV
A. Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Prioritas Pembangunan Nasional	1 BAB IV
B. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	2 BAB IV
C. Program dan Kegiatan	3 BAB IV
IV. PENUTUP	1 BAB V

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun Anggaran 2023	2 BAB III
Tabel 2. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun Anggaran 2024	4 BAB III
Tabel 3. Rumusan Rencana Program, kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Provinsi Sumatera Selatan	4 BAB IV

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, dalam Pasal 61 Ayat (1) menyatakan bahwa Pengembangan Perkebunan dilakukan secara terpadu dengan pendekatan kawasan pengembangan Perkebunan dan dilakukan secara terintegrasi antara lokasi budidaya perkebunan, pengolahan hasil Perkebunan, pemasaran, serta penelitian dan pengembangan sumber daya manusia dan harus terhubung secara fungsional yang membentuk kawasan pengembangan perkebunan kabupaten/kota, provinsi dan nasional.

Pendekatan pengembangan kawasan dirancang untuk meningkatkan efektivitas kegiatan, efisiensi anggaran dan mendorong keberlanjutan kawasan komoditi unggulan. Pendekatan pengembangan kawasan berbasis komoditas perkebunan dilakukan agar pembangunan perkebunan berjalan dengan utuh, terpadu dan berkelanjutan, serta fokus pada pencapaian sasaran yang ditetapkan.

Pengembangan kawasan berbasis komoditi perkebunan pada era otonomi daerah menjadi tanggung jawab sepenuhnya pemerintah daerah, yang dalam hal ini adalah ditingkat kabupaten/kota sebagai daerah otonom, dengan demikian daerah menjadi ujung tombak pembangunan kesejahteraan masyarakat dengan mengacu pada tolok ukur kemajuan pembangunan wilayah yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pendapatan perkapita yang merata dan tingkat pengangguran yang rendah.

Pembangunan sub sektor perkebunan merupakan tulang punggung perekonomian yang terus meningkat, seiring dengan peningkatan produksi dan kualitas hasil, perkembangan dan pertumbuhan kawasan dan ekonomi di wilayah sentra perkebunan/pedesaan yang sekaligus positif terhadap peningkatan pendapatan petani. Kondisi ini menggambarkan bahwa peranan pembangunan sub sektor perkebunan memberikan kontribusi yang besar terhadap pengembangan ekonomi pedesaan dan pertumbuhan kawasan baru yang berbasis komoditas perkebunan.

Tuntutan pasar dunia menjadi demikian penting untuk diperhatikan, bukan saja mutu produk yang dihasilkan, melainkan pembangunan berwawasan lingkungan justru menjadi perhatian negara-negara konsumen, oleh karenanya dalam merencanakan pemanfaatan ruang suatu kawasan perlu dikaji dan ditelaah beberapa aspek baik teknis maupun non teknis dari kawasan yang bersangkutan. Hal ini sangat

penting mengingat dalam penataan kawasan akan dilakukan alokasi serta penetapan suatu kegiatan, sehingga pertumbuhan dan perkembangan kawasan yang ditimbulkan oleh elemen-elemen kegiatan dalam suatu proses yang kontinyu, seperti pertumbuhan fisik kawasan seringkali tidak seimbang dengan perkembangan kawasan adanya perbedaan daya tampung fisik kawasan yang terbatas dengan pertumbuhan kawasan itu sendiri.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 merupakan rencana kerja pembangunan sub sektor perkebunan untuk jangka waktu satu tahun. Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis RKPD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang disusun oleh setiap perangkat daerah di bawah koordinasi BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan

Penyusunan rencana kerja ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas sub sektor perkebunan sehingga mendukung kesejahteraan petani, menjaga keberlanjutan lingkungan serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.

B. Landasan Hukum

Penyusunan rencana kerja instansi daerah mengikuti berbagai aturan dan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun peraturan daerah. Aturan-aturan tersebut dimaksudkan untuk memastikan perencanaan yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah. Beberapa aturan yang mendasari penyusunan rencana kerja instansi daerah antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
7. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 53 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan;

C. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memastikan bahwa Dinas Perkebunan berperan aktif dalam mencapai visi dan misi pemerintah daerah yang telah ditetapkan.
- b. Untuk menyelaraskan dengan kebijakan Nasional dan Daerah dan memastikan bahwa pembangunan daerah mendukung pencapaian tujuan nasional.
- c. Mengawal implementasi pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026.
- d. Mewujudkan pelaksanaan tujuan dan sasaran, strategis, kebijakan dan program Renstra.

Tujuan penyusunan rencana kerja Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Untuk merencanakan dan melaksanakan berbagai program kegiatan yang dapat mencapai tujuan pembangunan di sub sektor perkebunan.
- b. Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan anggaran serta menghindari pemborosan atau penyalahgunaan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
- c. Untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan benar-benar relevan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
- d. Sebagai bahan evaluasi pencapaian kinerja instansi dalam periode tertentu.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

II. GAMBARAN UMUM DINAS PERKEBUNAN

III. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023
- B. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Berjalan (2024)
- C. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- D. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- E. Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

IV. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- A. Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Prioritas Pembangunan Nasional
- B. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- C. Program dan Kegiatan

V. PENUTUP

II. GAMBARAN UMUM DINAS PERKEBUNAN

Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan sebagai instansi teknis yang menangani sub sektor perkebunan, sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan nomor: 14 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Sumatera Selatan, dan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan nomor: 53 tahun 2016 tentang susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan.

Tugas pokok Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan adalah "Melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang perkebunan".

Sedangkan fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

- a. Pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur
- b. Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang perkebunan
- c. Pembinaan dan pengendalian teknis di bidang perkebunan:
- d. Pembinaan produksi di bidang perkebunan
- e. Pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan
- f. Pembinaan UPTD
- g. Pembinaan pengawasan dan penataan prasarana dan sarana perkebunan
- h. Pembinaan pengendalian dan penanggulangan organisme pengganggu tanaman perkebunan
- i. Pembinaan pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman perkebunan
- j. Pembinaan penyelenggaraan penyuluhan dan pembinaan kemitraan usaha perkebunan
- k. Pembinaan penyelenggaraan, pengujian teknologi dalam rangka penerapan teknologi anjuran
- l. Pembinaan pemberian rekomendasi teknis perkebunan
- m. Pengkoordinasian pengendalian dan penanggulangan gangguan usaha perkebunan
- n. Pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan pengamanan barang milik negara/ daerah
- o. Pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan

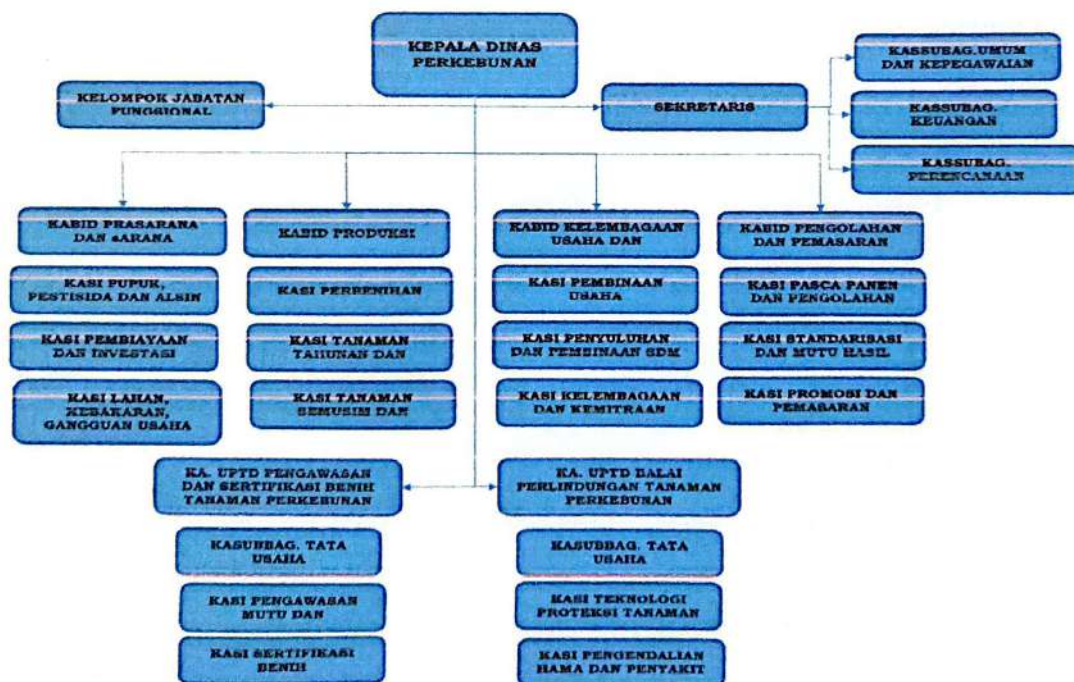
p. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan

Untuk membantu pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kerjanya Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan dibantu 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yaitu:

1. UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan (BPSBTP) yang mempunyai tugas memberikan bimbingan teknis pengawasan dan pengujian mutu benih dalam rangka penyiapan benih bermutu sesuai standar mutu benih yang ada, dan
2. UPTD Balai Proteksi Tanaman Perkebunan (BPTP) yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengujian dan pengembangan teknologi pengendalian organisme pengganggu tanaman, melaksanakan identifikasi jenis organisme pengganggu tanaman, pengadaan dan perbanyakan serta penyebaran agensia hayati dan pestisida nabati.

Melihat dari tugas dan fungsinya maka Pembangunan Perkebunan di Sumatera Selatan mempunyai peranan yang sangat besar dalam pertumbuhan perekonomian Provinsi Sumatera Selatan terutama dalam menghasilkan devisa, penyediaan lapangan kerja dan sumber pendapatan lebih dari satu juta kepala keluarga, menghasilkan bahan baku bagi industri, pengembangan wilayah serta memelihara kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Gambar Struktur Organisasi Dinas Perkebunan



III. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA ANGGARAN SKPD**A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023**

Tahun 2023, Dinas perkebunan Provinsi Sumatera Selatan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 26.998.812.882,- (Dua puluh enam miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus dua belas ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah). Anggaran yang terserap adalah sebesar Rp. 25.729.846.603, atau sebesar 95,30% dari total alokasi anggaran yang tersedia.

Dari semua program, kegiatan dan sub kegiatan yang diakomodir dalam renja, hampir semuanya terlaksana dengan baik, meskipun ada beberapa sub kegiatan yang capaiannya tidak mencapai 100%. Adapun sub kegiatan yang tidak tercapai 100% adalah sub kegiatan pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha pertanian pada kegiatan penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah kabupaten/kota dan program perizinan usaha pertanian. Sub kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena terkait dengan aturan yang ada.

Sub kegiatan lainnya yang tidak mencapai 100% adalah sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan pada kegiatan administrasi umum perangkat daerah dan program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi. Sub kegiatan ini tidak terlaksana secara penuh dikarenakan terdapat satu media cetak sebagai bahan bacaan yang diberhentikan untuk berlangganan.

Untuk lebih jelasnya capaian pelaksanaan renja 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Renja Tahun Anggaran 2023

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	14.142.641.200	13.109.263.475	92,73
A.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	325.000.000	253.161.507	77,90
B.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.989.769.000	9.479.670.717	94,89
C.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	66.375.000	66.375.000	100
D.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	817.274.000	693.847.231	84,90
E.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	328.375.000	326.997.650	99,58
F.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.715.848.200	1.462.956.859	85,26
G.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	900.000.000	826.254.511	91,81
II	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	3.081.250.000	2.996.629.653	97,25
A.	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	820.000.000	753.277.923	91,86
B.	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	2.261.250.000	2.243.351.730	99,21
III	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	3.379.420.000	3.312.674.700	98,02
A.	Penataan Prasarana Pertanian	3.379.420.000	3.312.674.700	98,02

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
IV	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	315.000.000	303.703.845	96,41
A.	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	315.000.000	303.703.845	96,41
V	Program Perizinan Usaha Pertanian	100.000.000	50.480.000	50,48
A.	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	100.000.000	50.480.000	50,48
VI	Program Penyuluhan Pertanian	5.980.501.682	5.957.094.930	99,61
A.	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	5.980.501.682	5.957.094.930	99,61
	Total (I+II+III+IV+V+VI)	26.998.812.882	25.729.846.603	95,30

B. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Berjalan (2024)

Tabel 2. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun Anggaran 2024

NO	Program/ Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d Bulan Ini			Narasi	Realisasi Fisik s.d Bulan Ini				Tertimbang Fisik (%)	Lokasi
			Target (%)	Realisasi			Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realiasi Fisik		
				%	(Rp)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	13.116.925.563	100	92,71	12.160.556.072	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100%	100	-	100,00	100,00	
A.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	87.100.000	100	98,45	85.751.421	Tersedianya Dokumen Perencanaan	5 Dokumen	100	-	100,00	100,00	
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	87.100.000	100	98,45	85.751.421	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	100	5 Dok.	100,00	100,00	Disbun
B.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.656.146.634	100	93,37	9.949.866.759	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	100	-	100,00	100,00	
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.522.666.634	100	93,30	9.818.096.759	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	792 Orang/Bulan	100	792 orang/bula n	100,00	98,75	Disbun
2.	Pelaksanaan Penausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	133.480.000	100	98,72	131.770.000	Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	5 Dokumen	100	5 Dok.	100,00	1,25	Disbun

NO	Program/ Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d Bulan Ini			Indikator Kinerja Program / Kegiatan (Outcome / Outputs)						Tertimbang Fisik (%)	Lokasi
			Target (%)	Realisasi		Narasi	Realisasi Fisik s.d Bulan Ini						
				%	(Rp)		Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
C.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	305.000.000	100	83,02	253.204.187	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kebutuhan kantor	1 Paket	100	-	100,00	100,00		
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000	100	99,72	19.943.000	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan	1 Paket	100	-	100,00	6,56	Disbun	
2.	Penyediaan Bahan Logistik kantor	65.000.000	100	89,67	58.285.854	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket	100	1 Paket	100,00	21,31	Disbun	
3.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.000.000	100	85,63	17.125.000	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	100	1 Paket	100,00	6,56	Disbun	
4.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.000.000	100	98,99	9.899.000	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	3 Dokumen	100	1 Dokumen	100,00	3,28	Disbun	
5.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	190.000.000	100	77,87	147.951.333	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	150 Laporan	100	laporan	100,00	62,30	Disbun	
D.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50.000.000	100	99,92	49.960.000,0	Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan yang Tersedia	1 Paket	100	1 Paket	100,00	250,00		

NO	Program/ Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d Bulan Ini			Indikator Kinerja Program / Kegiatan (Outcome / Outputs)					Tertimbang Fisik (%)	Lokasi
			Target (%)	Realisasi		Narasi	Realisasi Fisik s.d Bulan Ini					
				%	(Rp)		Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realiasi Fisik		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000	100	99,92	49.960.000	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	35 Unit	100	Unit	100,00	76,92	Disbun
E.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.540.000.000	100	87,99	1.355.006.404	Tersedianya Kebutuhan Penunjang ADM Perkantoran	1 Tahun	100	-	100,00	100,00	
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	100	100,00	5.000.000	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 Laporan	100	1 laporan	100,00	0,32	Disbun
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	590.000.000	100	73,72	434.922.154	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang tersedia	12 Laporan	100	6 Laporan	100,00	38,31	Disbun
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	945.000.000	100	96,83	915.084.250	Jumlah laporan penyedia jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	24 Laporan	100	12 Laporan	100,00	61,36	Disbun
F.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	478.678.929	100	97,51	466.767.301	Terpeliharanya barang milik daerah	1 Tahun	100		100,00	100,00	
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	458.500.000	100	97,53	447.195.701	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang di pelihara dan dibayarkan pajak dan perizinanya	90 Unit	100	unit	100,00	95,78	Disbun

NO	Program/ Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d Bulan Ini			Narasi	Realiasi Fisik s.d Bulan Ini					Tertimbang Fisik (%)	Lokasi
			Target (%)	Realisasi			Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realiasi Fisik			
				%	(Rp)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2.	Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	20.178.929	100	96,99	19.571.600	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	20 Unit	100	unit	100,00	4,22	Disbun	
II	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	59.325.355	100	99,16	58.825.355	Persentase Peningkat Luas Tanaman Menghasilkan	0,20%	100		100,00	100,00		
A.	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	59.325.355	100	99,16	58.825.355	Terlaksananya pengawasan sarana pertanian	17 Kab/Kota	100		100,00	100,00		
1.	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	59.325.355	100	99,16	58.825.355	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran pupuk, pestisida, alsintan dan sarana pendukung pertanian	4 Laporan	100	2 Laporan	100,00	100,00	17 Kab/Kota	
III.	Program Penyuluhan Pertanian	20.674.065.000	100	36,26	7.495.409.550	Meningkatnya Kelompok Petani yang Mendapatkan Penyuluhan	17 Kab/Kota	100		37,00	37,00		
A.	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	20.674.065.000	100	36,26	7.495.409.550	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	40 Kelompok	100		37,00	37,00		
1.	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	20.674.065.000	100	36,26	7.495.409.550	Jumlah kelompok tani yang mendapat pembinaan dan penyuluhan	100 Kelompok	100		37,00	37,00	17 Kab/Kota	
	Total	33.850.315.918	100	58,24	19.714.790.977	-	-		-	61,52	-		

C. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 53 Tahun 2016 tanggal 30 November 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan serta mempunyai salah satu fungsi Pembinaan dan pengendalian teknis dibidang perkebunan, maka dalam pelayanannya Dinas Perkebunan juga melakukan sertifikasi benih yang beredar di Provinsi Sumatera Selatan. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mencegah/mengurangi beredarnya benih palsu di Sumatera Selatan. Sertifikasi Benih/Bibit pada tahun 2024 dengan rincian :

1. Komoditi Karet: 149.633 bibit dalam Polybag, 60.000 bibit stum mata tidur, dan 700.000 Biji karet.
2. Komoditi Kelapa Sawit: 2.357.626 bibit dalam Polybag, dan 8.529.473 Kecambah

Sumber data: UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan, posisi Januari sd. Agustus 2024.

D. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan rencana pembangunan perkebunan Tahun 2025 difokuskan pada bantuan benih/bibit Karet, Kopi, alat panen dan pasca panen, pengendalian Organisme Pengganggu tanaman (OPT), pencegahan, penanggulangan kebakaran lahan dan gangguan usaha perkebunan, pembinaan dan pengawasan terhadap izin usaha perkebunan dan pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit yang diarahkan untuk kegiatan pendataan petani, ISPO dan perlindungan sosial bagi petani pekebun sawit.

E. Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Banyaknya usulan dari masyarakat petani untuk peningkatan usaha perkebunan seperti pembentukan Unit Pengolahan pemasaran bersama (UPPB), Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB), peremajaan kebun sawit rakyat, peremajaan tanaman karet, pemenuhan kebutuhan pupuk dan pemenuhan kebutuhan sarana pasca panen, mengharuskan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk mengakomodir kebutuhan tersebut ke dalam rencana kerja (Renja) Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan.

IV. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Prioritas Pembangunan Nasional

Tingginya tingkat kemiskinan dan tingkat kemiskinan ekstrem di Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan betapa krusialnya masalah kemiskinan dalam proses pembangunan. Karakteristik kemiskinan secara umum memiliki ciri yang relatif sama yaitu terdapat didaerah pedesaan dan umumnya bekerja sebagai buruh tani yang tidak memiliki tanah sendiri (menurut RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005 – 2025).

Tren tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan mengalami penurunan sebesar 1,69 persen poin dari 12,66 persen per Maret 2020 menjadi 10,97 persen pada per Maret 2024 tetapi masih berada di atas capaian nasional yaitu 9,03 persen. Tren tingkat kemiskinan ekstrem Provinsi Sumatera Selatan terus mengalami penurunan, per Maret 2024 mencapai 0,59 persen, turun 4,72 persen poin dari 5,31 persen Maret 2020. (sumber: Badan Pusat Statistik).

Pemerintah Pusat dan Daerah bekerja sama untuk mengatasi kemiskinan, sejalan dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden terpilih yaitu "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045" dan tertuang dalam Misi Asta Cita poin ke dua yaitu memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru dan poin keenam yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

Dalam 17 program prioritas Pemerintah, juga terdapat beberapa poin yang berhubungan dengan sektor pertanian untuk menurunkan angka kemiskinan yaitu pada poin 1. Mencapai swasembada pangan, 9. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani, 10. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi.

Komoditas perkebunan unggulan di Sumatera Selatan yaitu Kelapa Sawit, Karet, Kopi dan Kelapa. Strategi umum untuk pengembangan Kelapa Sawit dengan cara meningkatkan produktivitas dengan peremajaan kebun-kebun tua, penggunaan bibit berkualitas tinggi, pengembangan konektivitas antar komponen produksi dari hulu sampai hilir dan mendorong berkembangnya industri hilir kelapa sawit secara terpadu.

Untuk mendorong Pengembangan karet dilakukan peremajaan pohon karet dengan bibit unggul dalam rangka peningkatan produktivitas dan mempercepat usia produksi, pembenahan proses pengumpulan karet, Penyediaan energi untuk mendukung pengembangan industri hilir karet.

Untuk mendukung program-program tersebut juga telah direncanakan dalam Renja Dinas Perkebunan kegiatan-kegiatan yang meliputi penyediaan bibit karet dan kopi, penyediaan sarana panen dan pasca panen, pembinaan dan pengawasan penangkar benih/bibit tanaman perkebunan, serta penanggulangan organisme pengganggu tanaman.

B. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Sesuai dengan target dan sasaran yang dirumuskan dalam Renstra SKPD, maka diharapkan rancangan kerja SKPD Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 ini dapat mewujudkan pencapaian kinerja pembangunan perkebunan yang meliputi:

- 1) Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan petani pekebun. Pengelolaan usaha perkebunan akan semakin baik jika kualitas sumberdaya manusia yang ada baik aparat maupun non aparat ditingkatkan melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan. pembinaan kelembagaan diarahkan agar terjalin kemitraan yang baik antara kelembagaan petani dengan investor ataupun pengusaha perkebunan.
- 2) Meningkatnya mutu dan nilai tambah produk perkebunan, meningkatnya mutu dan nilai tambah produk hasil perkebunan diharapkan akan meningkatkan pendapatan petani pekebun. hal ini dapat tercapai apabila pengembangan agribisnis di berbagai sub sektornya dipadu dan diperkuat seperti di sub sistem perdagangan hasil/produk perkebunan, sub sistem pengolahan hasil perkebunan atau agroindustri serta subsistem perdagangan hasil kegiatan agroindustri.
- 3) Meningkatnya luas areal, kegiatan pembangunan perkebunan rakyat difokuskan pada upaya peremajaan tanaman karet tua.
- 4) Meningkatnya produksi, produktivitas dan pendapatan petani pekebun.

C. Program dan Kegiatan

Secara garis besarnya dalam penyusunan rencana kerja tahun 2025 terdapat 6 program dengan 15 kegiatan dan 32 sub kegiatan.

Tabel
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Provinsi Sumatera Selatan

No	Kode	Pemendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 050-3708)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 (Renstra 2024-2026)	
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
		DINAS PERKEBUNAN				35.586.287.343,00			31.487.096.946,90
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah		100	15.917.644.882,00		100	18.272.096.946,90
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan penunjang administrasi perkantoran			1.735.000.000			1.790.000.000
	3.27.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Palembang	1	20.000.000	PAD	1	20.000.000
	3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Palembang	12	600.000.000	PAD	12	650.000.000
	3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Palembang	24	1.115.000.000	PAD	24	1.120.000.000
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan perangkat daerah			1.040.000.000			1.108.264.882
	3.27.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Palembang	90	800.000.000	PAD	90	850.000.000

No	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 050-3708)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 (Renstra 2024-2026)	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	
	3.27.01.1.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Palembang	20	50.000.000	PAD	20	68.264.882	
	3.27.01.1.09.10	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Palembang	1	190.000.000	PAD	1	190.000.000	
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya tenaga administrasi keuangan perangkat daerah			10.874.380.000			12.248.832.064,90	
	3.27.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Palembang	792	10.544.380.000	DAU	792	11.918.832.064,90	
	3.27.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Palembang	5	330.000.000	PAD	5	330.000.000	
	3.27.01.1.06	Administrasi umum Perangkat daerah	Terpenuhi kebutuhan administrasi umum perangkat daerah			1.113.264.882			1.550.000.000	
	3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Palembang	1	35.000.000	PAD	1	50.000.000	
	3.27.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Palembang	1	300.000.000	PAD	1	500.000.000	
	3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah paket barang cetakan dan pengandaan yang disediakan	Palembang	1	50.000.000	PAD	1	100.000.000	
	3.27.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Palembang	3	50.000.000	PAD	3	50.000.000	
	3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Palembang	150	678.264.882	PAD	150	850.000.000	

No	Kode	Pemerindagri 90 Tahun 2019 (Kepmerindagri 050-3708)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 (Renstra 2024-2026)		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11		
	3.27.01.1.07	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Terpenuhi barang milik daerah penunjang urusan perangkat daerah			545.000.000			845.000.000		
	3.27.01.1.07.01	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Palembang	1	250.000.000	PAD	1	500.000.000		
	3.27.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Palembang	10	195.000.000	PAD	10	195.000.000		
	3.27.01.1.07.10	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Palembang	35	100.000.000	PAD	35	150.000.000		
	3.27.01.1.05	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Meningkatnya kapasitas SDM Perkebunan berdasarkan tugas dan fungsinya			285.000.000			400.000.000		
	3.27.01.1.05.02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Palembang	1	135.000.000	PAD	1	200.000.000		
	3.27.01.1.05.09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Sumsel dan luar provinsi	10	150.000.000	PAD	10	200.000.000		
	3.27.01.1.01	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Tersedianya laporan dan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah			325.000.000			330.000.000		
	3.27.01.1.01.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	17 Kab/kota dan pusat	5	300.000.000	PAD	5	300.000.000		

No	Kode	Pemerindagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 050-3708)		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 (Renstra 2024-2026)		
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	3.27.01.1.01.06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisat realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan iktisat realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisat realisasi kinerja SKPD	Palembang	1	25.000.000	PAD		1	30.000.000	
		Program Penyediaan dan Pengembangan sarana pertanian	Persentase Peningkatan Luas Tanaman Menghasilkan		0,40	3.523.642.461			0,41	5.595.000.000	
	3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Meningkatnya pengawasan peredaran sarana pendukung pertanian							2.145.000.000	
	3.27.02.1.01.01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran pupuk, pestisida, alsintan dan sarana pendukung pertanian	17 Kab/Kota	4	1.278.642.461	PAD		4	2.145.000.000	
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Terlaksananya pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/bibit perkebunan							3.450.000.000	
	3.27.02.1.02.01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih	17 Kab/kota	4.100	250.000.000	PAD		4.200	300.000.000	
	3.27.02.1.02.05	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	17 Kab/kota	4	46.000.000	PAD		4	3.150.000.000	
	3.27.02.1.02.12	Perbanyakan benih bersertifikat berbentuk batang	Jumlah benih bersertifikat perkebunan berbentuk batang	17 Kab/kota	125000	1.815.000.000	PAD		-	-	

No	Kode	Pemendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 050-3708)		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 (Renstra 2024-2026)	
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	3		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2			4	5	6	7	8	10	11
	3.27.02.1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisme dan Mikroorganisme Kewenangan Provinsi		Terlaksananya pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisme kewenangan provinsi			134.000.000		-	-
	3.27.02.1.03.04	Pengembangan dan pelaksanaan sistem manajemen mutu SDG Tumbuhan dan mikroorganisme		Jumlah pelaksanaan sistem manajemen mutu SDG tumbuhan dan mikroorganisme	17 Kab / Kota	1	134.000.000	PAD	-	-
		Program Penyediaan dan Pengembangan prasarana pertanian		Persentase Peningkatan Prasarana Perkebunan		13,75	250.000.000		13,80	350.000.000
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian		Terlaksananya penataan prasarana pertanian			250.000.000			350.000.000
	3.27.03.1.01.09	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya		Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan penataan prasarana pendukung pertanian lainnya	17 Kab/Kota	4	50.000.000	PAD	4	50.000.000
	3.27.03.1.01.10	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan rutin gedung UPTD pertanian serta sarana pendukungnya		Jumlah gedung UPTD pertanian serta sarana pendukungnya yang dibangun, dipelihara dan direhabilitasi	Palembang	1	200.000.000	PAD	2	300.000.000
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian		Luas Areal yang tertanggulangi dari serangan OPT dan Gangguan Usaha		750	500.000.000		850	850.000.000

No	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 050-3708)		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 (Renstra 2024-2026)	
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2	3	4		5	6	7	8	10	11	
	3.27.05.1.01	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian provinsi	Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian provinsi				500.000.000			850.000.000	
	3.27.05.1.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah luasan serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan		17 Kab/Kota	550	300.000.000	PAD	600	500.000.000	
	3.27.05.1.01.03	Pencegahan, penanganan kebakaran lahan, dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	Jumlah luasan Pencegahan, penanganan kebakaran lahan, dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan		17 Kab/Kota	200	200.000.000	PAD	250	350.000.000	
		Program Perizinan Usaha Pertanian	Meningkatnya Pengawasan Perusahaan Perkebunan			316	75.000.000		316	100.000.000	
	3.27.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah kabupaten/kota	Terlaksananya penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah kabupaten/kota				75.000.000			100.000.000	
	3.27.06.1.01.05	Pembinaan dan pengawasan Penerapan Izin Usaha Perkebunan	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi		17 Kab /Kota	18	75.000.000	PAD	20	100.000.000	
		Program Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya Kelompok Petani yang Mendapatkan Penyuluhan			93	15.320.000.000		94	6.320.000.000	

No	Kode	Pemendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 050-3708)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 (Renstra 2024-2026)	
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
	3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Kelembagaan ekonomi pertanian berbasis kawasan yang berkembang kapasitasnya			15.220.000.000			6.220.000.000
	3.27.07.1.02.02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	17 Kab / Kota	93	15.220.000.000	PAD	94	6.220.000.000
	3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Pertanian Berbasis Kawasan	Kelembagaan ekonomi pertanian berbasis kawasan yang berkembang kapasitasnya			100.000.000			100.000.000
	3.27.07.1.03.06	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koperasi Petani	Jumlah koperasi petani yang dibentuk dan beroperasi		1	100.000.000	PAD	1	100.000.000

V. PENUTUP

Pembangunan sub-sektor perkebunan merupakan bagian dari sektor pertanian yang memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Sub-sektor ini meliputi kegiatan budidaya tanaman perkebunan yang dimanfaatkan untuk berbagai produk, seperti minyak kelapa sawit, karet, kopi, teh, kakao, tembakau, dan rempah-rempah. Pembangunan sub-sektor perkebunan memiliki berbagai dimensi yang melibatkan peningkatan produktivitas, kesejahteraan petani, dan keberlanjutan lingkungan.

Pembangunan sub sektor perkebunan berkembang kian pesat dengan berbagai kendala yang makin kompleks, bukan saja dari segi pembiayaan, perencanaan, pelaksanaan dan pembagian wilayah komoditas dalam suatu kawasan, melainkan kultur dan struktur usaha dan jumlah Sumber Daya Manusia perkebunan relatif belum mendukung pembangunan perkebunan secara komprehensif. Oleh sebab itu diperlukan upaya perbaikan dan restrukturisasi atau Revitalisasi dibidang usaha perkebunan yang meliputi pengembangan kompetensi SDM perkebunan baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian dan pengawasan, pengembangan model dan pendekatan pola usaha yang lebih representative dan kebijakan yang adaptif terhadap mekanisme pasar sehingga paradigma pembangunan perkebunan yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan, berdimensi pasar dan berdaya saing global dapat memberikan kesejahteraan seluas luasnya bagi petani pekebun.

Demikian, Rencana Kerja Kegiatan Pembangunan Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2025 yang dapat kami sajikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.